



569 Kelian Desa dan Subak Terima Bansos Bupati



BUPATI I Wayan Geredeg di acara penyerahan bantuan sosial kepada 569 kelian di Amlapura, Jumat (3/7).

AMLAPURA, NusaBali

Sebanyak 569 kelian desa pakraman dan kelian subak, menerima bantuan sosial dari Bupati Karangasem I Wayan Geredeg. Bantuan itu untuk lembaga sosial tersebut dan disinkronkan berupa insentif atas pengabdian selama ini membangun desa, berlandaskan awig-awig yang berlaku.

Geredeg menyerahkan sendiri bantuan itu yang merupakan program rutin setahun sekali. Saat menyerahkan bantuan itu didampingi Kadis Budaya dan Pariwisata Karangasem I Wayan Purna dan Kepala Bappeda I Ketut Sedana Mertha, di Amlapura, Jumat (3/7).

Geredeg mengingatkan, sebagai bentuk perhatian pemerintah atas pengabdian kelian desa pakraman, kelian subak dan kelian subak abian membangun desa, berupaya memberikan bantuan agar termotivasi mempersatukan krama banjar dan krama desa pakraman, menjalankan 'swadarmaning dharma agama'.

Sebab, kata Geredeg, dharma agama tersebut, berkaitan dengan adat masing-masing. "Adat itu kan pelaksana agama, menjadi satu kesatuan, saling mendukung. Menjalankan kreativitas adat, otomatis mendukung kegiatan agama," katanya.

Secara tidak langsung kata Geredeg, semangat Tri Hita Karana, terimplementasikan, yang merupakan hubungan umat manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan antar umat manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sehingga harapan ke depan terjadi keseimbangan kehidupan yang harmonis. "Sebagai contoh hubungan umat manusia dengan alam, menggelar upacara untuk seluruh tanaman di setiap Tumpek Ngatag (Sabtu, Kliwon Wariga), atau 25 hari sebelum hari Galungan," katanya.

Pentingnya menjaga alam agar kehidupan jadi seimbang katanya, sehingga menciptakan lingkungan jadi rindang dan hijau. Sehingga terhindar dari bencana longsor, banjir, dan kekeringan.

Purna dalam laporannya, dari 569 kelian yang hadir, terbagi tiga kelompok: 190 kelian desa pakraman masing-masing bagian insentif Rp 400.000, tetapi bantuan per desa pakraman Rp 10 juta. Selebihnya, 379 Kelian Subak dan Kelian Subak Abian bagian insentif masing-masing Rp 250.000, bantuan tiap subak Rp 3 juta.

"Bantuan per kelian desa pakraman dan kelian subak itu, hanyalah sifatnya memotivasi agar lebih bersemangat berswadaya di desa masing-masing. Penggunaan bantuan itu sesuai kebutuhan pembangunan," pinta Purna seraya mengatakan berupaya bantuan tahun mendatang ada peningkatan. **k16**

Edisi : Sabtu, 4 Juni 2015

Hal : 8



SENGKETA GWK

Main Tembok, PPTPA Geram

PERHIMPUNAN Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) komplek Garuda Wisnu Kencana (GWK) kembali bersurat ke Wakil Gubernur Bali. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelola kawasan GWK melakukan pemblokiran dan pelarangan buka toko dan jalan masuk ke pertokoan tersebut. "Apa yang dilakukan pengelola GWK sudah menyimpang dari pengelola sebelumnya, sebab akses jalan tersebut adalah jalan umum (fasilitas umum). Disamping itu sekitar bulan Juli 2014 membangun jalan *rurung agung* melalui lahan milik Putu Antara yang ada sertifikatnya. Ada pengerukan lahan dengan alat berat dan pengaspalan tanpa memberi tahu pemilik sah dan tidak pernah minta izin," kata Wakil Ketua PPTPA, Sudiarta Indrajaya di Denpasar, kemarin (3/7).

Menurutnya, pembangunan jalan "rurung agung" itu dilakukan setelah unjuk rasa serta blokade massa dari warga Banjar Giri Dharma yang menuntut akses "rurung agung" seperti dijanjikan PT Garuda Adimatra Indonesia (PT GAIIn) beberapa tahun sebelumnya.

"Rurung agung" merupakan akses warga banjar untuk ke setra atau kuburan dan berada dalam kawasan GWK. Namun, tanpa minta izin pihak Putu Antara, manajemen GWK memindahkan akses "rurung agung" di antaranya melewati lahan milik Putu Antara.

"Walau ada indikasi tindak pidana penyerobotan dengan ancaman hukuman empat tahun menurut KUHP, kami belum membawa kasusnya ke penegak hukum, karena tidak mau dicap kurang menghargai GWK yang disakralkan orang Bali. Tapi, kesabaran kami ada batasnya. Kalau nanti kasusnya melebar kemana-mana, jelas yang menjadi sumber masalah bukanlah kami," ingat Sudiarta.

Namun, kata dia, karena sampai sekarang tidak ada itikat baik, perilaku tidak terpuji PT GAIIn ini diadukan ke Wagub Bali, melalui Surat No: 03/BI/PA/VI/15 tanggal 30 Juni 2015. Surat juga ditembuskan ke sejumlah petinggi negara. Seperti Presiden, DPR-RI, DPD-RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Komnas HAM, Kapolri, Ombudsman, sementara di Bali ditembuskan ke Gubernur, DPRD Bali, Bupati Badung dan DPRD Badung, PHDI Bali dan PHDI Badung dan sejumlah lembaga lainnya.

Surat PT BI dan Plaza Amata intinya mohon jadwal ulang

pertemuan mediasi dengan PT GAIIn maupun PT MMI (Multi Matra Indonesia), yang awalnya dijadwalkan 29 Juni 2015. Karena mendadak digeser Wagub ke tanggal 1 Juli 2015, PT BI dan Plaza Amata meminta ditunda sampai sesudah 13 Juli. "Karena sebagian pengurus sudah punya jadwal acara, di antaranya ada yang keluar negeri," kata Sudiarta.

Selain jadwal ulang, PT BI dan Plaza Amata juga meminta agar dalam rapat mediasi berikutnya, yang dihadiri dari PT GAIIn maupun PTMMI adalah pemilik yang berwenang mengambil keputusan. Bukan sebaliknya kata dia, diutus karyawan yang tidak bisa memutuskan apa pun. "Pihak PT BI dan Plaza Amata juga tetap meyakini dan mendukung pernyataan awal Wakil Gubernur, agar tembok di Plaza Amata dibongkar, fasum fasos dilepas, jalan yang telah ditinggikan di akses masuk dikembalikan seperti semula," tutupnya.

Sementara itu, Putu Wirata Dwikora SH dan Made Dewantara Endrawan, SH dari Kantor Advokat I Wayan Sudirta SH & Rekan mengingatkan, kalau pemilik toko tidak mendapat keadilan, dan kesewenangan manajemen GWK dibiarkan berlanjut, pasti ada tanda tanya besar dibalik itu. Karena itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan didesak untuk mengusut aset-aset negara yang diberikan untuk membantu pembangunan GWK melalui PT GAIIn. **(ras/rid)**

Edisi : Sabtu, 4 Juli 2015
Hal : 24



SENGKETA GWK

Main Tembok, PPTPA Geram

PERHIMPUNAN Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) komplek Garuda Wisnu Kencana (GWK) kembali bersurat ke Wakil Gubernur Bali. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelola kawasan GWK melakukan pemblokiran dan pelarangan buka toko dan jalan masuk ke pertokoan tersebut. "Apa yang dilakukan pengelola GWK sudah menyimpang dari pengelola sebelumnya, sebab akses jalan tersebut adalah jalan umum (fasilitas umum). Disamping itu sekitar bulan Juli 2014 membangun jalan *rurung agung* melalui lahan milik Putu Antara yang ada sertifikatnya. Ada pengerukan lahan dengan alat berat dan pengaspalan tanpa memberi tahu pemilik sah dan tidak pernah minta izin," kata Wakil Ketua PPTPA, Sudiarta Indrajaya di Denpasar, kemarin (3/7).

Menurutnya, pembangunan jalan "rurung agung" itu dilakukan setelah unjuk rasa serta blokade massa dari warga Banjar Giri Dharma yang menuntut akses "rurung agung" seperti dijanjikan PT Garuda Adimatra Indonesia (PT GAIIn) beberapa tahun sebelumnya.

"Rurung agung" merupakan akses warga banjar untuk ke setra atau kuburan dan berada dalam kawasan GWK. Namun, tanpa minta izin pihak Putu Antara, manajemen GWK memindahkan akses "rurung agung" di antaranya melewati lahan milik Putu Antara.

"Walau ada indikasi tindak pidana penyerobotan dengan ancaman hukuman empat tahun menurut KUHP, kami belum membawa kasusnya ke penegak hukum, karena tidak mau dicap kurang menghargai GWK yang disakralkan orang Bali. Tapi, kesabaran kami ada batasnya. Kalau nanti kasusnya melebar kemana-mana, jelas yang menjadi sumber masalah bukanlah kami," ingat Sudiarta.

Namun, kata dia, karena sampai sekarang tidak ada itikat baik, perilaku tidak terpuji PT GAIIn ini diadukan ke Wagub Bali, melalui Surat No: 03/BI/PA/VI/15 tanggal 30 Juni 2015. Surat juga ditembuskan ke sejumlah petinggi negara. Seperti Presiden, DPR-RI, DPD-RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata, Komnas HAM, Kapolri, Ombudsman, sementara di Bali ditembuskan ke Gubernur, DPRD Bali, Bupati Badung dan DPRD Badung, PHDI Bali dan PHDI Badung dan sejumlah lembaga lainnya.

Surat PT BI dan Plaza Amata intinya mohon jadwal ulang

pertemuan mediasi dengan PT GAIIn maupun PT MMI (Multi Matra Indonesia), yang awalnya dijadwalkan 29 Juni 2015. Karena mendadak digeser Wagub ke tanggal 1 Juli 2015, PT BI dan Plaza Amata meminta ditunda sampai sesudah 13 Juli. "Karena sebagian pengurus sudah punya jadwal acara, di antaranya ada yang keluar negeri," kata Sudiarta.

Selain jadwal ulang, PT BI dan Plaza Amata juga meminta agar dalam rapat mediasi berikutnya, yang dihadiri dari PT GAIIn maupun PTMMI adalah pemilik yang berwenang mengambil keputusan. Bukan sebaliknya kata dia, diutus karyawan yang tidak bisa memutuskan apa pun. "Pihak PT BI dan Plaza Amata juga tetap meyakini dan mendukung pernyataan awal Wakil Gubernur, agar tembok di Plaza Amata dibongkar, fasum fasos dilepas, jalan yang telah ditinggikan di akses masuk dikembalikan seperti semula," tutupnya.

Sementara itu, Putu Wirata Dwikora SH dan Made Dewantara Endrawan, SH dari Kantor Advokat I Wayan Sudirta SH & Rekan mengingatkan, kalau pemilik toko tidak mendapat keadilan, dan kesewenangan manajemen GWK dibiarkan berlanjut, pasti ada tanda tanya besar dibalik itu. Karena itu, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan didesak untuk mengusut aset-aset negara yang diberikan untuk membantu pembangunan GWK melalui PT GAIIn. **(ras/rid)**

Edisi : Sabtu, 4 Juli 2015
Hal : 24